

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifundin dan Saebani, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia Bandung.
- Akbar, Rusdi, Robyn picher and Brian Perrin. 2012. “Performance Measurement In Indonesia The Case Of Local Government”. *Pacific Accounting Review*.
- \_\_\_\_\_, Robyn picher and Brian Perrin. 2015. “Implementing Performance Measurement Systems Indonesia Local Government Under Pressure”. *Pacific Accounting Review*.
- Braun, Virginia and Victoria Clarke, 2006. “Using thematic analysis in psychology”.
- Djojosoekarto, Agung. JRG. Djopari. Sutriyono. Daniel Lantang. Indra Jaya Piliang. Agustinus Fatem. Naffi Sanggenafa. 2008. *Kinerja Otonomi Khusus Papua*. Kemitraan Jakarta.
- Elfrida. 2014. *Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)*. 2014 *Tesis*. Maksi UGM Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan)
- Fauziah, Devi Zulfi. “Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Berbasis *Logic Model* (Studi Pada Pemerintah Kota Tangerang)”. 2014 *Tesis*. Maksi UGM Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan)
- Fiedman, Mar. 2005. “Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities”. *FPSI Publising*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STI YKPN Yogyakarta. Edisi Revisi Seri bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.
- Harun, Harun dan Kamase, P. Haryono. 2012. *Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia*”. *Australian Accounting Business and Finance Journal, Vol 6 (2)*
- Hasil Evaluasi LAKIP Pemda Tahun 2012 dokumen-2/akuntabilitas-Kinerja/hasil-evaluasi-akip/file/3699-hasil-evaluasi-akip-kab-kota-<http://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-tahun-2012>. diakses tanggal 30

Januari 2015

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah .

Kementerian Negara Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  
Tahun 2012.

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,  
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah,  
Pelaksanaan Tata Usaha Keuanagn Daerah dan Penyusunan Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belaanja Daerah

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang  
Pedoman Penyusuan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Tap MPR RI  
Nomor XI/MPR/1998

Knowlton, Lisa. Wyatt dan Cynthia C. Philips. 2013 “ The Logic Model Guidebook  
Better Strategies for Great Results” Edisi 2. SAGE Publication: Los Angeles,  
London, New Delhi, Singapore, Washington DC.

Longo, Paul. J. 2002. “ The Performance Blueprint: An Integrated Logic Model  
Develop To Enhance Performnace Measurement Literacy: The Case of  
Performnace-Based Contract Management. EDRS Price .

\_\_\_\_\_. 2002. “Setting Outcomes, Measuring Results”. A Workshop on  
Performance Measurement Burr Oak State Park Resort Glouster, Ohio.  
Diakses pada tanggal 11 Februari 2015.

Mahmudi. 2014. Implementasi Akuntabilitas Akrual di Pemerintah Daerah.  
Seminar tanggal 12-12-2014.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta

\_\_\_\_\_. 2009. Akuntabilitas Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.

- Marvin, Henry. 2012. : Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bantul “, *Tesis S2*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.”  
(Tidak Dipublikasikan)
- Mahsun, Mohamad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE-  
Yogyakarta
- McLaughlin, Jhon. A and Gretchen B. Jordan. 1999. “Logic Models: A Tool for  
Telling Your Program’s Performance Story”. Final Draft of paper in  
*Evaluation and Program Planning*. Diakses pada tanggal 11 Februari 2015.
- Panduan Pedoman Umum Penulisan Tesis Maksi FEB UGM 2014.
- Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Pemerintah  
Berbasis Akrua
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 dan 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan  
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Nomor 71 Tahun 2010 tentang  
Standar Akuntansi Pemerintah
- Rahmadoni, Firman. 2013. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Hasil  
(Studi Pada Pemerintah Kota Pangkal Pinang)
- Ramandei, Pilipus. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasasaran Anggaran dan Sistem  
Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Manajemen Aparat Pemerintah  
Daerah
- Sekaran,Umar. 2006. *Research Methods For Business*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.  
Bandung.
- UUD Tahun 1945
- UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah
- UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

## Keuangan Negara

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 21/2002 tentang Otonomi Khusus Papua

UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah